



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PUPUK INDONESIA GROUP  
**UNIT KERJA** : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YETTY ENDARWATI
2. Jabatan : SENIOR PROJECT MANAGER
3. NHK : 428988

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 9.346.050.000**

1. Tanah Seluas 415 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI  
Rp. 871.050.000
2. Tanah Seluas 1945 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI  
Rp. 1.650.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL  
SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA  
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 3.550.000.000
5. Tanah Seluas 2300 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI  
Rp. 575.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/82 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 655.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 6.000.000
2. MOBIL, MERCEDEZ SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
300.000.000
3. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI  
Rp. 36.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
13.000.000



5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2016, HASIL  
SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	525.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.145.738.900
F. HARTA LAINNYA	Rp.	616.500.000
Sub Total	Rp.	12.288.288.900
III. HUTANG	Rp.	352.213.939
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.936.074.961

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.